



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perhelatan Piala AFF tahun 2012 lalu menjadi pembuktian bahwa sepak bola menjadi sebuah olahraga nasional. Olahraga yang mampu merebut perhatian masyarakat di tanah air ini, memiliki suporter atau pendukung fanatik dalam jumlah besar. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sampai menyiapkan 15.000 tiket pertandingan *matchday* terakhir Grup B Piala AFF 2012 antara tuan rumah Malaysia dan Indonesia ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 1/12/2012).

Animo penonton sepak bola untuk datang ke stadion juga tinggi, walaupun hanya untuk menonton pertandingan persahabatan atau laga amal. Laman resmi klub sepakbola AC Milan, memberitakan, sebanyak 40.000 orang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menonton laga amal antara Milan Glorie melawan Indonesia All Star Legends ([www.acmilan.com](http://www.acmilan.com), 10/2/2013). *Charity Match* yang diadalkan pada 9 Februari 2013 ini diisi oleh pemain-pemain veteran AC Milan serta para mantan pemain timnas Indonesia.

Ironisnya, dalam tiga tahun terakhir sejak Piala AFF 2010, berbagai masalah justru melanda induk organisasi sepak bola tanah air, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pertama adalah lahirnya Liga Primer Indonesia

(LPI). Padahal, PSSI sudah memiliki turnamen atau kompetisi bernama Liga Super Indonesia (LSI).

Andi Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga berkali-kali menyatakan dukungan kepada LPI, sebab LPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Padahal statuta FIFA dengan jelas memberikan definisi mengenai liga sebagai “*an organization that is subordinate to an Association*”; sebuah organisasi (sepak bola) yang berada di bawah naungan Asosiasi. Yang dimaksud Asosiasi tidak lain persatuan sepak bola di sebuah negara yang diakui oleh FIFA. Dalam konteks Indonesia, Asosiasi itu tidak lain Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Karena PSSI tidak pernah mengakui LPI, maka LPI tidak pernah diakui FIFA. LPI di mata FIFA adalah “*illegal league*”, “*breakaway league*”, “*runaway league*”. (Lesmana. 2013: 120).

Kedua adalah masalah dualisme PSSI. Pada Kongres PSSI di Solo tanggal 11 Juli 2011, Djohar Arifin dan Farid Rachman terpilih masing-masing sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Banyak keputusan PSSI yang memicu reaksi keras dari dalam tubuh PSSI itu sendiri.

Daftar keputusan kontroversial PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Arifin adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar keputusan kontroversial PSSI

No.	Keputusan	Penjelasan
1.	Memecat pelatih Alfred Riedl	Alasan pemecatan adalah pengurus

		PSSI tidak menemukan perjanjian kontrak tertulis antara Riedl dengan PSSI.
2.	Mengakhiri kontrak hak siar dengan ANTV	Alasan pencabutan hak siar Liga Indonesia dengan ANTV yakni karena ada stasiun televisi lain yang berani membayar lebih mahal. ANTV memegang hak siar Liga Indonesia selama 10 tahun sampai 2017.
3.	Membubarkan PT Liga Indonesia	Menurut Tondo Widodo, Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, tidak ada dari hasil Kongres di Bali yang memberi mandat atau amanah kepada PT LI sebagai operator Liga Indonesia. Padahal, Liga Indonesia sudah digulirkan jauh sebelum Kongres PSSI di Bali.
4.	Melahirkan klub kembar	Beberapa klub kenamaan anggota PSSI melahirkan klub kembar. Klub yang diakui PSSI adalah yang sejak awal mendukung LPI.
5.	Kontroversi Arya Abhiseka	Arya Abhiseka diangkat sebagai General Manager Timnas Indonesia dan juga Manajer LPI. Belakangan diketahui tersangkut kasus penggelapan dana Asosiasi Pemain Profesional Indonesia.
6.	Kontroversi Bernard Limbong	Pengangkatan Jenderal TNI-AD, Bernard Limbong sebagai penanggung jawab Tim Nasional

		diakui salah satu Exco, La Nyalla M. Mattalitti tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat Exco.
7.	Kontroversi Saleh Mukadar	Ketum Persebaya Surabaya diangkat sebagai Deputi Sekjen PSSI bidang Kompetisi. Padahal, Mukadar masih menjalani hukuman dari pengurus PSSI Provinsi Jawa Timur berupa larangan berkecimpung dalam dunia sepak bola selama tiga tahun.
8.	Kontroversi Persipura	Pengurus PSSI memutuskan tidak meyeritakan Persipura pada Liga Champions Asia (LCA). Padahal, Persipura adalah juara ISL musim 2010/2011 yang berhak menjadi sebagai wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia tersebut.
9.	Pemecatan empat anggota exco	Setelah 2 x 24 jam tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Eksekutif PSSI, AFC, dan FIFA, Komite Etik PSSI memberikan sanksi berupa pemecatan permanen dari jabatan <i>Executive Committee</i> PSSI.

Sumber: Lesmana, Tjipta (2013, p.261)

Tak ayal, keputusan PSSI ini menimbulkan perlawanan dalam tubuh PSSI sendiri. Perlawanan terhadap kepemimpinan Djohar dibuktikan dengan lahirnya Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI). KPSI mengadakan Kongres

Luar Biasa di Jakarta pada 18 Maret 2012. Pada hari yang sama, PSSI pun menyelenggarakan kongres tahunan di Palangkaraya. Kongres PSSI versi KPSI yang menetapkan La Nyalla Mattalitti, mantan anggota Exco PSSI, sebagai ketua umum, menyatakan tidak lagi mengakui kepengurusan Djohar Arifin-Arif Rachman. Sebaliknya, Kongres PSSI pun menyatakan tidak mengakui “PSSI KPSI”.

Konflik dalam tubuh PSSI ini mendapat perhatian serius dari FIFA, induk organisasi sepak bola dunia. FIFA memberikan batas waktu kepada PSSI hingga 15 Juni 2012 untuk menggelar kongres dalam menyelesaikan masalah dualisme kompetisi dan kepengurusan atau kalau tidak, Indonesia dapat diberi sanksi larangan bermain di level Internasional.

Namun, nyatanya sanksi FIFA untuk Indonesia ditunda hingga Februari 2013. Wakil Presiden sekaligus Komite Eksekutif FIFA, Prince Ali bin Al Hussein bahkan menyatakan dukungannya kepada Indonesia, serta berjanji untuk menjauhkan Indonesia dari sanksi FIFA. Penundaan ini bukan yang pertama kali karena setelah 15 Juni 2012, FIFA memberi tenggat waktu kepada PSSI hingga 10 Desember 2012 ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 3/3/2013).

Akhirnya, konflik sepak bola Indonesia menemukan titik terang setelah FIFA menyetujui PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Pada 22 Februari 2013, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dilantik menggantikan Mallarangeng, Roy Suryo, mendapat surat dari Primo Curvaro, Ketua Komite Asosiasi FIFA. Dalam surat tersebut, FIFA menegaskan bahwa kongres PSSI

yang akan digelar pada 17 Maret 2013 adalah Kongres Luar Biasa (KLB). Kongres itu hanya mengagendakan empat hal yang berkaitan dengan penyelesaian kisruh di tubuh PSSI ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 5/3/2013).

Dalam liputan khusus *KOMPAS.com*, dijelaskan bahwa empat agenda tersebut adalah penyatuan liga, revisi statuta PSSI, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif, dan penyelenggaraan kongres sesuai dengan KLB Solo 2011 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 18/3/2013). Terkait dengan pembahasan statuta, peserta kongres memutuskan merevisi pasal 35 Tentang Komite Eksekutif, dengan menambah jumlah anggota Exco dari sebelas orang menjadi 15 orang dengan rincian satu ketua umum, dua wakil ketua umum, dan 12 anggota. Merujuk pada buku Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola*, Pasal 35 ayat (1) Statuta PSSI menyatakan Komite Eksekutif beranggotakan sebelas orang; satu ketua umum, satu wakil ketua umum dan sembilan anggota. (Lesmana, 2013, 269).

Walau sempat diwarnai *walk out* enam anggota Exco PSSI, KLB yang diselenggarakan di Hotel Borobudur tetap berjalan. Pada 22 Maret 2013 atau tepat lima hari setelah KLB, Ketua Umum Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, mendapat ucapan selamat dari Presiden FIFA Sepp Blatter atas suksesnya KLB. Melalui surat elektronik, FIFA menyetujui hasil KLB PSSI ([www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), 25/3/2013). Berikut kutipan ucapan selamat dari Blatter kepada Rita.

Dengan sangat senang saya menginformasikan kepada Anda bahwa Exco FIFA menyambut hangat sukses Kongres PSSI yang diatur oleh FIFA untuk mengatasi permasalahan di sepakbola Indonesia. Secara khusus *roadmap* telah disetujui oleh FIFA untuk penyatuan liga dan statuta baru.

Terimalah ucapan terima kasih saya atas dukungan dan inisiatif Anda di masalah yang rumit ini. Komitmen dan usaha Anda sangat penting bagi suksesnya Kongres PSSI – Sepp Blatter, Presiden FIFA.

Berita mengenai isu KLB berkembang dari waktu ke waktu dan menyebar cepat di media massa *online* contohnya portal berita dalam negeri seperti *VIVAnews* (viva.co.id), *KOMPAS.com* (kompas.com), dan *detikcom* (detik.com). Cepat dalam pengertian di sini adalah mengacu pada empat hal yang wajib dipenuhi media menurut Gerald L Baron, yakni kecepatan, kedalaman informasi, kepercayaan, dan hiburan. (Baron, 2002: 69).

Dengan kecepatan media *online* mengabarkan berita, hasil KLB sudah dapat diketahui pada malam hari sesaat setelah kongres selesai. Efek kecepatan media *online* ini bermacam-macam. Pertama, mendapat respon (*feedback*) yang sangat cepat dari para pembaca atau pengunjung portal tersebut. Kedua, pembaca diberikan tempat seluas-luasnya untuk mengomentari berita yang baru dirilis. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini.





Gambar 1.1 Komentar pembaca portal *VIVA.co.id*

Sumber: *Vivabola.co.id*

Kelebihan lain dari media *online* adalah dapat memberikan *effect* atau dampak yang besar, baik berupa tindakan nyata maupun sebuah aksi di dunia maya. Pada kasus dualisme PSSI, muncul gerakan yang mengatasnamakan pendukung Liga Primer Indonesia (LPI) dan Liga Super Indonesia (LSI) di media sosial seperti Facebook. Seperti contoh yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Akun pendukung LPI di media sosial

Sumber: <https://www.facebook.com/pages/IPL-PRO-PSSI/392229834127056>

Tidak seperti media lainnya, standar dan format media *online* masih relatif baru dan terus berkembang. Jurnalisme dalam media *online* adalah lahan baru yang paling menggemparkan industri jurnalistik saat ini. (Craig, 2005: 7). Namun demikian, ada pertanyaan mengenai materi yang digunakan. Ketika media berita menjadi bagian dari konglomerasi, kredibilitasnya bisa dipertanyakan ketika mereka mengulas (mempromosikan) film, musik, buku, dan produk lain yang dihasilkan dan didistribusikan oleh cabang perusahaan sendiri. Konsumen media

dibenarkan dalam menanyakan seberapa objektif dan kritis wawancara aktor, sutradara, dan pengarang ketika mereka bekerja untuk cabang lain perusahaan. Dengan kata lain, “Ini jurnalisme atau propaganda?” (Severin, Tankard, Jr, 2011: 437). Media massa *online VIVAnews* ([viva.co.id](http://viva.co.id)) adalah contoh bagian dari konglomerasi tersebut.

VIVA Group adalah perusahaan media dibawah naungan PT Visi Media Tbk, milik Aburizal Bakrie, kakak kandung eks Wakil Ketua Umum PSSI, Nirwan Bakrie. VIVA Group memiliki dua stasiun televisi swasta nasional *tvOne* dan *ANTV*, serta media massa *online VIVAnews* ([VIVA.co.id](http://VIVA.co.id)). Saat PSSI masih dipimpin Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, PSSI meneken kontrak dengan *ANTV* untuk menyiarkan Liga Super Indonesia (LSI) selama sepuluh tahun hingga 2017. Seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya, pengurus PSSI membekukan PT Liga Indonesia, pengelola LSI, sehingga klub-klub yang berlaga di LSI tidak diikut sertakan di LPI. Walau begitu, toh *ANTV* tetap menyiarkan LSI hingga saat ini.

Pada Selasa, 6 Maret 2012, PSSI memboikot dua stasiun televisi nasional milik VIVA Group, *tvOne* dan *ANTV*. Portal berita *TEMPO.CO* memulai ceritanya dengan dua paragraf awal seperti sebagai berikut:

Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memboikot dua stasiun televisi nasional *TV One* dan *Antv*. Kedua stasiun televisi milik keluarga Bakrie itu dinilai hanya menjadi corong para pengurus PSSI era Nurdin Halid, yang didukung keluarga Bakrie.

"Kami tidak percaya pada *TV One* dan *ANTV* karena dua tivi itu sudah jadi corong pengurus lama," kata Deputy Sekretaris Jenderal PSSI Bidang Kompetisi, Saleh Mukadar, di Kantor PSSI, Selasa, 6 Maret 2012. "Maka di acara malam nanti kami sudah memutuskan tidak akan datang."

Portal berita *detikcom* memberitakan peristiwa yang sama dengan paragraf awal sebagai berikut:

PSSI memboikot dua media televisi nasional, *TVOne* dan *ANTV*. Kedua media itu dinilai acap memelintir pemberitaan sehingga menyudutkan PSSI.

Hal itu disampaikan oleh Deputy Sekjen PSSI Saleh Mukadar, di kantor PSSI, di Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012). "Saya katakan, PSSI tidak percaya dengan *TVOne* maupun *ANTV*. Karena perkataan kami selalu diplintir oleh mereka," tegas Saleh.

Sedangkan *Republika Online* memulai kalimat pembukanya dengan kalimat sebagai berikut:

PSSI secara resmi memboikot media televisi nasional yaitu TV One dan ANTV. Karena kedua media televisi milik keluarga Bakrie itu dinilai telah melakukan pemelintiran berita yang terjadi di tubuh federasi sepak bola nasional.

Deputy Sekjen PSSI Bidang Kompetisi, Saleh Mukadar di Jakarta, Selasa (6/3) mengatakan, salah satu bentuk pemboikotan itu adalah tidak akan menghadiri undangan TV One dalam acara 'Indonesia Lawyer Club'.

Kanal khusus sepakbola di *VIVA.co.id*, yakni *VIVABOLA* adalah satu-satunya yang luput dalam memberitakan pemboikotan *tvOne* dan *ANTV*. Melihat fenomena ini, sejumlah ahli media telah menyebutkan bahwa kepemilikan media menentukan kontrol media, yang pada gilirannya menentukan isi media, mungkin menjadi penyebab utama pengaruh media. (Severin, Tankard, Jr, 2011: 437).

Keterkaitan antara *ANTV* dan *tvOne* dengan *VIVAN.co.id* menyangkut LSI

membuat dua media ini akan sulit untuk objektif dalam pemberitaan seputar kisruh PSSI, khususnya berita mengenai KLB.

Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan peristiwa penting yang hasilnya berdampak besar pada kemajuan sepak bola Indonesia, maka diharapkan pemberitaan KLB ini mengikuti kaidah jurnalistik, terutama menyangkut objektivitas. Objektivitas dalam pemberitaan KLB menjadi penting karena terkait dengan pembentukan opini publik.

Permasalahan objektivitas berita terus menjadi obyek studi dalam penelitian jurnalisme (Siahaan: 2001). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektivitas pemberitaan *VIVABOLA* mengenai isu Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 2013.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Objektivitas merupakan norma ideal dalam jurnalisme. Dengan adanya objektivitas, jurnalis diharapkan mampu menyajikan berita yang sesuai dengan realitas sebenarnya. Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas penulis adalah seberapa besar tingkat objektivitas *VIVA.co.id* dalam isu pemberitaan Kongres Luar Biasa PSSI.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai objektivitas cukup sering dilakukan. Namun, kebanyakan meneliti media siar (Westerstahl, 1983, Tikhonova, 2003). Akibatnya

indikator yang digunakan adalah indikator untuk pengukuran teknis di media siar, seperti misalnya slot waktu siaran. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat objektivitas dalam media massa *online*, khususnya *VIVAnews* dalam pemberitaan Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi jurusan Ilmu Komunikasi, dan menjadi masukan di lingkungan akademik yang mengadakan pengembangan penelitian terhadap masalah yang sama, yaitu objektivitas.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang media massa dan menambah wawasan peneliti mengenai objektivitas pemberitaan media.

Peneliti juga berharap dapat memberi masukan pada pelaku industri media terutama objektivitas media dan berguna sebagai masukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian mengenai masalah serupa di masa yang akan datang.

## 1.5 Batasan Penelitian

Karena penelitian ini cukup luas, maka peneliti memberi batas sebagai berikut: Penelitian dibatasi hanya pada berita teks di *VIVA.co.id* mengenai Kongres Luar Biasa PSSI mulai dari pertama kali berita KLB muncul, yakni periode 26 Februari 2013 hingga 27 Maret 2013.



UMN